

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DENGAN VARIABEL INTERVENING SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

YOSEFRINALDI
02212/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada DPKAD Se-Sumatera Barat)

Nama : Yosefrinaldi

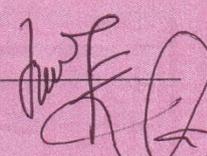
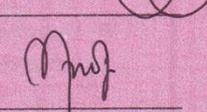
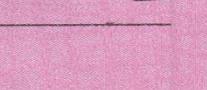
BP/NIM : 2008/02212

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Deviani, SE, M.Si, Ak	2. 
3. Anggota	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	3. 
4. Anggota	: Hendri Agustin, SE, M.Sc, Ak	4. 

ABSTRAK

Yosefrinaldi. 02212. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat). 2013. Skripsi.Fakultas Ekonomi.Universitas Negeri Padang

Pembimbing I : Lili Anita, SE, M.Si, Ak

II : Deviani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris. (1) Pengaruh kapasitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Pengaruh pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah DPKAD Se-Sumatera Barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode *total sampling*, sebanyak 19 DPKAD. Pengumpulan data dengan kuesioner kepada responden yaitu kepala bagian akuntansi dan staf akuntansi DPKAD. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis jalur dengan kapasitas SDM dan pemanfaatan TI sebagai variabel eksogen, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel endogen, dan SPIP sebagai variabel intervening. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 16.0 *for windows*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pengaruh yang signifikan positif antara kapasitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,921 > 1,667$ dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ (H_1 diterima). (2) Pengaruh yang signifikan positif antara pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,799 > 1,667$ dengan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$ (H_2 diterima). (3) Pengaruh yang signifikan positif antara SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,830 > 1,667$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (H_3 diterima).

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi kantor DPKAD untuk meningkatkan kapasitas SDM, pemanfaatan TI, dan SPIP agar laporan keuangan yang berkualitas dapat dihasilkan. Selain itu juga disarankan agar memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan juga diperhatikan. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya memperbanyak jumlah sampel dan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **”Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”**. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak dan Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Bapak/Ibu kepala bagian akuntansi dan staf akuntansi DPKD Se-Sumatera Barat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Kedua orang tua beserta kedua orang adik tercinta serta segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2008, terima kasih atas dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Pembatasan Masalah	13
D. Perumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	15
A. Kajian Teori	15
1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia	23
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi	25
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	27
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Konseptual	38
D. Hipotesis Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Populasi, Sampel, dan Responden	41
C. Jenis Dan Sumber Data	42

D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Variabel Penelitian	43
F. Pengukuran Variabel	44
G. Instrumen Penelitian	44
H. Uji Validitas Dan Reliabilitas	46
I. Uji Coba Instrumen	48
J. Uji Asumsi Klasik	49
K. Teknik Analisis Data	49
L. Definisi Operasional	55
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Sampel dan Responden Penelitian	58
B. Analisis Deskriptif	59
C. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	72
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	74
E. Uji Model	76
F. Pembahasan	84
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Keterbatasan	91
C. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Opini LKPD di Wilayah Provinsi Sumatera Barat	8
2. Penelitian Terdahulu	33
3. Daftar Nama DPKD Se-Sumatera Barat	41
4. Skala Pengukuran.....	44
5. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	45
6. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	48
7. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	58
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	59
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Keahlian.....	60
10. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
11. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja	61
12. Statistik Deskriptif	63
13. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia	64
14. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	66
15. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Sistem Pengendalian Intern	68
16. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kualitas Laporan Keuangan	70
17. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	72
18. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil	73
19. Uji Normalitas	74
20. Uji Homogenitas	75
21. Uji Model Sub Struktur I	76
22. Koefisien Regresi Sub Struktur I	77
23. Uji Model Sub Struktur II	78
24. Uji Regresi Sub Struktur II	78
25. Uji F Statistik	80
26. Koefisien determinasi	81
27. Ringkasan Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	38
2. Struktur Diagram Jalur Pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 Terhadap Y	51
3. Sub Struktur Diagram Jalur Pengaruh X_1 dan X_2 Terhadap X_3	52
4. Sub Struktur Diagram Jalur Pengaruh X_1 , X_2 dan X Terhadap Y	52
5. Diagram Jalur Pengaruh X_1 Terhadap X_3	77
6. Diagram Jalur Pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 Terhadap Y	79
7. Struktur Diagram Jalur Pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 Terhadap Y	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	95
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	101
3. Uji Asumsi Klasik	109
4. Pengujian Model dengan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	110
5. Uji F dan Uji Koefisien Determinasi	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum. Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah lebih relevan digunakan dalam penelitian. Namun karena Peraturan Pemerintah ini baru efektif penggunaannya pada 2014, penulis sengaja tidak mencantumkannya dalam penelitian ini.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang mana para pemakai laporan keuangan berhak untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas agar mereka tidak keliru dalam mengambil suatu keputusan. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir menyebutkan bahwa kualitas informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Hilir dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2010) mengatakan bahwa selain

kapasitas sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi.

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006). Oleh karena itu kapasitas sumber daya manusia yang handal sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai informasi.

Kemampuan sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dapat dirancang melalui suatu sistem pengendalian internal dengan tujuan umumnya adalah efisiensi dan efektivitas operasi. Pengendalian internal dalam organisasi akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran organisasi. Aspek yang paling penting dari pengendalian internal adalah personel. Jika karyawan adalah orang yang kompeten dan bisa dipercaya, pengendalian lain bisa tidak ada dan laporan keuangan yang bisa diandalkan masih bisa dihasilkan (Arens, 2003:397-404).

Lingkungan pengendalian merupakan salah satu komponen pengendalian internal yang terdiri atas tujuh faktor diantaranya yaitu komitmen terhadap kompetensi serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Komitmen terhadap kompetensi mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan tingkat kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan tertentu dan menggunakan karyawan dengan keahlian serta pengetahuan yang sesuai atas masing-masing pekerjaan. Sedangkan kebijakan dan praktik sumber daya manusia, menyangkut personel suatu entitas sangat memperhatikan kemampuan. Kebijakan dan praktik seperti itu berkaitan dengan mempekerjakan, melatih, mengevaluasi, mempromosikan dan mengkompensasikan karyawan serta memberikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya (Guy, 2003:230-232).

Penggunaan teknologi informasi juga mempunyai andil yang besar untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran

informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Seperti kita ketahui bahwa total volume APBN/APBD dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah.

Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010.

Penggunaan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data. Teknologi informasi juga meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi dari informasi. Peningkatan ke pengendalian internal sebagai hasil pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi yaitu kendali komputer menggantikan kendali manual.

Satu keuntungan teknologi informasi adalah kemampuan untuk meningkatkan pengendalian internal dengan menggabungkan kendali yang dilakukan komputer dalam aktivitas proses transaksi sehari-hari (Arens, 2003:400-451). Karakteristik sistem informasi pelaporan keuangan yang terkomputerisasi dapat mempengaruhi jenis aktivitas pengendalian yang ditetapkan entitas, tetapi tidak boleh mempengaruhi tujuan aktivitas pengendalian itu sendiri (Guy, 2003:285).

Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Widjajanto, 2001:89). Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah serta kemampuan *multiprocessing* namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah.

Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

Hal penting lainnya yang tidak boleh kita abaikan jika berbicara tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah, selanjutnya disebut SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Jika penerapan SPIP berjalan dengan baik tentu laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas baik pula.

SPIP bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) secara dini. SPIP akan membantu memandu entitas berjalan bagaimana semestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel (Arens, 2008:370).

Sistem akuntansi memerlukan pengendalian internal atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian internal akuntansi (Mahmudi, 2007). Komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern

akuntansi antara lain : (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas.

Indikator sederhana yang dapat kita pakai untuk menilai apakah suatu laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas adalah opini yang di peroleh oleh laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Berikut data ikhtisar Hasil Pemeriksaan LKPD Kab/Kota di Sumatera Barat.

Tabel 1
LKPD Prov. Sumatera Barat 2009-2011

No.	Nama Entitas	Opini		
		2009	2010	2011
1	Prov. Sumatera Barat	TMP	WDP	WDP
2	Kab. Agam	WDP	WDP	WDP
3	Kab. Dharmasraya	WDP	TMP	WDP
4	Kab. Kepulauan Mentawai	WDP	WDP	WDP
5	Kab. Lima Puluh Kota	WDP	WDP	WDP
6	Kab. Padang Pariaman	WDP	WDP	WDP
7	Kab. Pasaman	WDP	WDP	WDP
8	Kab. Pasaman Barat	TMP	WDP	WDP
9	Kab. Pesisir Selatan	WDP	WDP	WDP
10	Kab. Sijunjung	WDP	WDP	WDP
11	Kab. Solok	WDP	WDP	WDP
12	Kab. Solok Selatan	TMP	TMP	TMP
13	Kab. Tanah Datar	WTP	WDP	WDP
14	Kota Bukittinggi	WDP	WDP	WDP
15	Kota Padang	WDP	WDP	WDP
16	Kota Padang Panjang	WDP	WDP	WDP
17	Kota Pariaman	WDP	WDP	WDP
18	Kota Payakumbuh	WDP	WDP	WDP
19	Kota Sawahlunto	WDP	WDP	WDP
20	Kota Solok	WDP	WDP	WDP

Sumber :Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012

Secara umum opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Barat baru pada level Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini mengindikasikan kepada pemakai laporan keuangan bahwa ada masalah yang ditemui disana karena

idealnya laporan keuangan itu harus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Terkait dengan masalah opini laporan keuangan, Ketua BPK RI Hadi Poernomo (Metrojambi, 2012) saat penyampaian Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih tergolong sangat rendah. BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 34 LKPD 7 persen, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 341 LKPD 66 persen, opini tidak wajar (TW) 5 persen atas 26 LKPD tahun 2011, dan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) atas 115 LKPD 22 persen. Walaupun persentase yang memperoleh opini WTP dan WDP sedikit meningkat dari tahun 2010 namun hal ini masih sangat jauh dari harapan. Ia juga sempat menyinggung penyebab hal itu bisa terjadi adalah karena ketidakefisienan penggunaan anggaran, penyimpangan administrasi dan masih lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Selain itu Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, menyatakan penyebab masih rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari masalah sumber daya manusia. Beliau juga menyampaikan kesanggupannya memberikan bantuan kepada daerah jika sekiranya ada daerah yang membutuhkan bantuan sumber daya manusia yang berkualitas (kontan.co.id, 2012). Hal senada juga penulis temui saat melakukan survei pendahuluan penelitian pada Mei 2012 pada SKPD di Kota Padang, masih adanya sebagian staf akuntansi yang bukan berlatarbelakang pendidikan akuntansi.

Fakta di lapangan yang penulis temui di SKPD Kota Padang tentang penggunaan teknologi informasi juga tidak kalah menariknya untuk di bahas. Pada beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang, pemahaman staf terhadap pemanfaatan teknologi informasi sudah baik karena adanya pelatihan-pelatihan dalam mengaplikasi *software* yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terhubung secara *online* pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) Kota Padang namun mereka terkendala dengan jumlah dan kualitas komputer yang masih kurang.

Hal ini semakin di pertegas lagi oleh penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) terhadap sepuluh SKPD di Sumatera Barat tahun 2008 dan 2009, di-temukan bahwa pemahaman staf terhadap pemanfaatan teknologi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik *hardware* maupun *software* dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi yang memadai.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya oleh Indriasari (2008), yang menemukan bukti empiris kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Ogan Ilir tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Delanno (2012), yang menyatakan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah daerah serta pengawasan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Adanya perbedaan hasil penelitian yang diperoleh tersebut, membuat peneliti semakin ingin untuk melakukan penelitian ulang kepada variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kebanyakan penelitian terdahulu tentang kualitas laporan pemerintah daerah hanya memfokuskan penelitian pada SKPD yang ada di Kab/Kota tempat meneliti. Tanpa sadar mereka mungkin mengabaikan peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sebagai pihak yang mengkonsolidasikan laporan keuangan dari masing-masing SKPD. Walaupun laporan keuangan yang diberikan oleh masing-masing SKPD dinilai sudah baik tetapi jika pihak yang mengkonsolidasikan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya tentu laporan keuangan yang berkualitas itu tetap masih belum bisa di peroleh. Hal inilah yang membuat penulis berkeyakinan bahwa DPKAD perlu untuk di pandang secara khusus karena peranan yang dimainkannya itu cukup besar.

Dari uraian di atas, peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Barat. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Sumatera Barat selain karena keterbatasan waktu dan biaya juga disebabkan karena opini LKPD masing-masing Kab/Kota di Sumatera Barat tahun 2011 masih juga belum ada satu pun yang memperoleh *opini Wajar Tanpa Pengecualian*.

Peneliti memberi judul penelitian ini **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Sumatera Barat).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah;

1. Sejahteraman penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Barat?
2. Sejahteraman kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Barat?
3. Sejahteraman pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap sistem pengendalian intern pemerintah?
4. Sejahteraman pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kab/Kota di Sumatera Barat?
5. Sejahteraman pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kab/Kota di Sumatera Barat melalui sistem pengendalian intern pemerintah?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Sumatera Barat dengan variabel intervening sistem pengendalian intern pemerintah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Sejauhmana pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Sumatera Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris tentang;

1. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Sumatera Barat.
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Sumatera Barat.

3. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Sumatera Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan akuntansi di pemerintahan.
2. Bagi Akademik, sebagai khasanah penelitian terutama di bidang sektor publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan Akademika.
3. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Kualitas Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006:247) mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

c. Komponen Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidaknya-tidaknya terdiri dari :

1. Laporan realisasi anggaran;

Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

2. Neraca;

Menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Laporan arus kas;

Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Catatan atas laporan keuangan.

Menyajikan pengungkapan penjelasan yang tidak dimuat pada 3 laporan di atas, seperti metode penyusutan, metode yang dipakai, dan lainnya.

d. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Menurut Soewardjono (2005), merumuskan kualitas spesifik pelaporan keuangan dalam dua kategori yaitu kualitas primer beserta unsur-unsurnya dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevanan atau keberpautan atau relevansi (*relevance*) dan keterandalan atau reliabilitas (*reliability*), dan ketepatan penyimbolan (*representational faithfulness*). Unsur keberpautan adalah nilai prediktif, nilai balikan, dan ketepatanwaktuan. Sedangkan unsur keterandalan adalah keterujian atau verifikasiabilitas (*verifiability*). Kualitas sekunder adalah

keterbandingan (*comparability*), ketaatasasan atau konsistensi (*consistency*) dan kenetralan atau netralitas (*neutrality*).

Sedangkan menurut Hongren, Harrison, Robinson dan Secokusumo dalam bukunya “Akuntansi di Indonesia” yang diterjemahkan oleh Maudy Warouw (1998:609) menyatakan bahwa agar dapat digunakan dalam pembuatan keputusan, informasi akuntansi tersebut haruslah relevan, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan.

Jonas dan Blanchet (2000), menambahkan bahwa informasi keuangan bermanfaat dalam pengambilan keputusan selain relevan dan andal sebaiknya juga memiliki kejelasan (*clarity*) dalam arti dapat dimengerti atau dipahami yaitu apakah informasi keuangan jelas, padat, ringkas, dan memadai. Demikian juga dengan informasi yang memiliki nilai prediksi tergantung kepada bagaimana informasi tersebut dapat menyajikan pendapatan yang tidak normal atau tidak biasa dengan diharapkan secara tepat dapat ditaksir pada periode berikutnya. Penyajian informasi keuangan seperti itu disebut sebagai *earning persistence*. Selain itu nilai prediktif informasi keuangan juga tergantung bagaimana informasi tersebut dapat digolongkan sesuai bisnis perusahaan, sehingga investor dapat mengetahui prospek perusahaan bersangkutan. Selanjutnya informasi keuangan tersebut tergantung pada kelengkapannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, kualitas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tuju-

annya. Keempat karakteristik tersebut hampir sama dengan karakteristik laporan keuangan yang tercantum dalam PSAK Tahun 2004. Berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Hendriksen (2000) menyatakan ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan

yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi keputusan. Ketepatan waktu informasi akuntansi menurut Hendriksen (1992) mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi, dikatakan informasi akuntansi harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dari paparan diatas dapat kita menilai bagaimana seharusnya laporan keuangan yang mempunyai kualitas yang baik, apakah telah memenuhi karakteristik kualitatif atau belum. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan itu sendiri.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kata kapasitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, ketika kita memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan (JICA, 2004). Dalam pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam pembangunan masyarakat, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kapasitas sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kapasitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kapasitas merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Indriasari, 2008). Menurut beberapa pakar, kapasitas adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada

kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010) :

- a. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan
- b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi

diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi.

Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak.

Yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011):

1. Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,
2. Keakurasian dalam perhitungan dan perbandingan lebih besar,
3. Kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,
4. Penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu,
5. Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,
6. Pilihan pemasukan data dan penyediaan *output* lebih luas/banyak, dan
7. Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.

Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Aren (2008:370) sasaran hasil yang luas, dalam merancang suatu sistem kendali yang efektif:

1. Keandalan Pelaporan Keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas menyiapkan laporan keuangan untuk para investor, kreditur, dan para pemakai lainnya. Manajemen mempunyai tanggungjawab baik hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsi-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

2. Efisiensi dan Efektivitas Operasional

Pengendalian di dalam suatu perusahaan dimaksudkan untuk mendorong pemakai yang efektif dan efisien atas sumber dayanya, mencakup personil, untuk mengoptimalkan sasaran perusahaan. Bagian penting dari kendali ini adalah informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan internal.

3. Ketaatan Pada Hukum dan Peraturan

Semua perusahaan publik harus mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Organisasi-organisasi publik, non publik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dalam akuntansi, seperti undang-undang perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah 60 Nomor Tahun 2008, tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah.

2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara. Penerapan unsur ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyatukan dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah, yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian mencakup:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelagasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko;
- b. Analisis risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses dan sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Untuk menyelenggarakan sistem informasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan revidu lainnya.

Sedangkan Mahmudi (2007) menyebutkan komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem dan prosedur akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP Nomor 56 tahun 2005): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (2)

sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas; (3) sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

b. Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau kalaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

c. Formulir, dokumen, dan catatan

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

d. Pemisahan tugas

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara

tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Tausikal (2007)	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD	Secara simultan dan parsial variabel independen berpengaruh terhadap kinerja SKPD	Penelitian menggunakan variabel independen sistem akuntansi dan variabel dependen TI	Studi Empiris penelitian ini adalah di Kabupaten Maluku Tengah dan variabel independen yang lain
2	Indriasari (2008)	Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan SPI terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemanfaatan TI dan SPI berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sedangkan kapasitas SDM tidak memiliki pengaruh	Variabel independen dan variabel dependen yang diteliti sama dengan yang penulis teliti	Studi empiris yang berbeda (Pemko Palembang dan Kab Ogan Ilir). Penulis memposisikan SPI sebagai variabel intervening
3	Delanno (2010)	Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Inter sebagai variabel intervening	Variabel eksogen dan intervening berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah	Variabel eksogen dan Intervening sama dengan penulis	Penulis tidak memasukkan pengawasan sebagai variabel eksogen serta lokasi dan sasaran penelitian yang berbeda.

6. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa mudah dipahami merupakan salah satu indikator berkualitasnya LKPD. Mudah dipahami disini menyangkut sumber daya manusia yang menghasilkannya. Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian Harifan (2009) menemukan bukti empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Padang diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Jumlah pegawai staf akuntansi masih kurang dan sebagian besar pegawai subbagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam menerapkan sistem

akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pengendalian dalam aktivitas pemerintah akan mendorong pemakaian sumber daya, mencakup personil, secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Aspek yang paling penting dari pengendalian internal adalah personel. Jika karyawan adalah orang yang kompeten dan bisa dipercaya, pengendalian lain bisa tidak ada dan laporan keuangan yang bisa diandalkan masih bisa dihasilkan.

b. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Jogiyanto, 1995 (dalam Harifan, 2009) menjelaskan bahwa informasi yang berkualitas dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) terhadap sepuluh SKPD di Sumatera Barat tahun 2008 dan 2009, ditemukan bahwa pemahaman staf terhadap pemanfaatan teknologi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti

komputer, baik *hardware* maupun *software* dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi yang memadai.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin *multiprocessing*.

Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penggunaan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

c. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel (Arens, 2008:370). Penelitian Putri (2010) tentang penerapan sistem pengendalian internal pada SKPD Pemerintah Kota Padang bahwa sistem pengendalian internal untuk menghasilkan suatu kualitas laporan keuangan masih belum memadai

Sistem pengendalian internal diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem Pengendalian Internal terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Salah satu unsur-unsur dalam sistem pengendalian internal adalah penilaian risiko serta informasi dan komunikasi. Dalam penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah tindakan manajemen yang mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

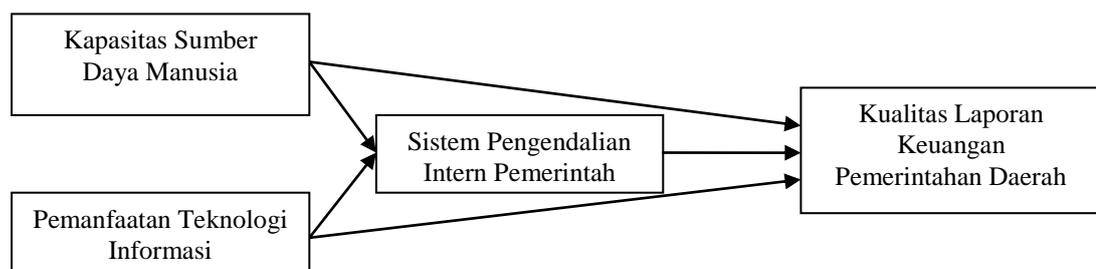
Sedangkan dalam informasi dan komunikasi harus disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif

sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Jadi semakin baik penerapan sistem pengendalian internal akan semakin baik pula kualitas penyajian laporan keuangan yang didapatkan.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan menerapkan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Barat. Suatu laporan keuangan itu berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis yang ingin dibuktikan dari penelitian ini adalah:

- H₁ : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Sumatera Barat
- H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Sumatera Barat
- H₃ : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Sumatera Barat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai Pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan SPIP sebagai variabel intervening adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Di mana, semakin baik kapasitas sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Di mana, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Di mana, semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 36,29% sedangkan sisanya 61,24% ditentukan oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Dari hasil penelitian ini berdasarkan data distribusi frekuensi skor, di mana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel kualitas laporan keuangan, indikator relevan dengan TCR kategori cukup. Menunjukkan bahwa informasi yang termuat di dalamnya seharusnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna yaitu ketidakmampuan DPKD/DPKAD dalam menyelesaikan laporan keuangan (LRA, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan) tepat waktu.
3. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan agar mempunyai kualitas.
2. Penelitian ini masih terbatas pada kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll.